



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2023**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2022.

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Surabaya Nomor : 180/14611/436.1.2/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Perihal : Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 172/3985/436.5/2022 tanggal 8 Juli 2022 Perihal : Pemberitahuan;
 3. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 172/4694436.5/2022 tanggal 12 Agustus 2022 Perihal : Pemberitahuan;
 4. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 377 Kom A/Eks/VII/2022 tanggal 12 Juli 2022 Perihal : Usulan Judul Raperda Prakarsa Komisi A;
 5. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 53/KomisiB/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 Perihal : Usulan Judul/Materi Raperda;
 6. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 227/Kom.C/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 7. Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 38/Komisi.D/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 8. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 10/BPP/X/2022 tanggal 10 Oktober 2022 perihal usulan Judul Propemperda 2023;
 9. Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Kota Surabaya tanggal 11 Oktober 2022;
 10. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/4205.2/013.2/2022 tanggal 2 November 2022 Hal : Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023;

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Nopember 2022**

**WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**

Ttd.

A. HERMAS THONY

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**



**Mutandar Rachman, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660111 199602 1 002**

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD SURABAYA
NOMOR : 37 TAHUN 2022
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2022

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA TAHUN 2023

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pariwisata							Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya.	Komisi A
2.	Pemanfaatan lahan kosong milik Pemerintah Kota Surabaya untuk Kepentingan Masyarakat							1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKKP); 2. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.	Komisi B
3.	Pengelolaan Sampah Permukiman							Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan.	Komisi C
4.	Perlindungan dan Pelayanan Bagi							1. Dinas Kesehatan;	Komisi D

	Penyandang Disabilitas							2. Dinas Pendidikan; 3. Dinas Sosial.	
5.	Toleransi dalam Kehidupan Masyarakat							1. Dinas Sosial; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.	BPP
6.	Energi Biru							1. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga 2. Bagian Hukum dan Kerjasama.	BPP
7.	Pengembangan Kampung Cerdas di Kota Surabaya	Mencakup 6 Pilar utama : 1. Smart governance; 2. Smart branding; 3. Smart economy; 4. Smart living; 5. Smart society; 6. Smart environment						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Pendidikan; 3. Bagian Hukum dan Kerjasama.	Komisi A
8.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan	Pengelolaan Perusahaan Daerah Pasar Surya, Permodalan						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;	Komisi B

	Daerah Surya	Pasar							<ul style="list-style-type: none"> 2. Badan Pendapatan Daerah; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 5. Bagian Hukum dan Kerjasama. 	
9.	Pengendalian dan Penanggulangan Banjir	Kebijakan yang mengatur pengendalian banjir di Kota Surabaya							<ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Dinas Sosial; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 5. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 	Komisi C

								6. Bagian Hukum dan Kerjasama.	
10.	Perubahan Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Memajukan pendidikan di Kota Surabaya						1. Bagian Hukum dan Kerjasama; 2. Dinas Pendidikan.	Komisi D
11.	Hunian Yang Layak	Terkait Bangunan pada penyediaan Rumah Susun						1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 5. Bagian Hukum dan Kerjasama; 6. Dinas Sosial; 7. Dinas Lingkungan Hidup.	BPP

12.	Pemajuan Kebudayaan, Kejuangan dan Kepahlawanan Kota Surabaya	Mengatur, menguatkan dan mengembangkan spirit						1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama.	BPP
13.	Perubahan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame	Penataan Reklame, Jaminan Bongkar, pelayanan perijinan penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya	V					1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan 2. Badan Pendapatan Daerah; 3. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga.	Komisi A
14.	Pengelolaan Rumah Susun Komersial di Kota Surabaya	Pengelolaan Rumah Susun Komersial di Kota Surabaya	V					1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian	Komisi C

								dan Pengembangan; 4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga; 5. Bagian Hukum dan Kerjasama; 6. Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan.	
15.	Ketenagakerjaan	Perlindungan Tenaga Kerja di Surabaya dan mewajibkan setiap perusahaan yang ada di Surabaya memperkerjakan Tenaga kerja lokal Surabaya	V					1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama.	Komisi D
16.	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Industri Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman	Pengelolaan Fasilitas Umum	V					1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3. Dinas Perumahan Rakyat dan	Komisi A

								Kawasan Permukiman serta Pertanahan.	
17.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Menanggulangi Kemiskinan yang ada di Kota Surabaya	V					1. Dinas Sosial; 2. Bagian Hukum dan Kerjasama.	Komisi D
18.	Pembentukan Produk Hukum Daerah	Produk Hukum Daerah di Kota Surabaya						Bagian Hukum dan Kerjasama.	BPP
19.	Ijin Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum (RHU)	Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum	V					1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	BPP
20.	Pengelolaan Sampah Medis	Pengelolaan Sampah Medis	V					1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Lingkungan Hidup; 3. Rumah Sakit Umum Daerah.	BPP
21.	Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	V					1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan 2. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;	Komisi B

								<ul style="list-style-type: none"> 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. 	
22.	Penyelenggaraan Angkutan Publik	Penyelenggaraan Angkutan Publik	V					<ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 2. Dinas Perhubungan. 	Komisi C
23.	Kepemudaan	Kepemudaan						<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata 2. Dinas Pendidikan. 	Komisi D

24.	Pelayanan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pelayanan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	V			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan; 3. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam. 	Komisi B
25.	Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	V			V		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; 2. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. 	Komisi D

26.	Tempat Hunian Berimbang	Tempat Hunian Berimbang		V				1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.	
-----	-------------------------	-------------------------	--	---	--	--	--	--	--

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2023

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan	Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan		V	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan		V	Dinas Perhubungan	

		Analisis Dampak Lalu Lintas			Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas				
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	Penyesuaian substansi terkait pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, tempat pengabuan (krematorium) dan penyelenggaraan pemakaman jenazah		V	-		V	Dinas Lingkungan Hidup	
3.	Taman Hutan Raya	Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	V		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
4.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Surabaya	V		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK. 350/5/2017 tentang Obat Hewan	V		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

5.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Revisi 5 tahunan terhadap arahan rencana pola ruang dan struktur ruang utama Kota Surabaya yang dilengkapi dengan arahan peraturan zonasi		V	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilakukan peninjauan kembali RTRW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun		V	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	
6.	Bangunan	Penyempurnaan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah	V		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja	V		Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	

		Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan							
7.	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	V		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8.	Penyelenggaraan Perlindungan Anak	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014	V		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9.	Penanaman Modal	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan	V		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

					Investasi di Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.				
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Adanya upaya memberikan kemudahan pelayanan untuk masyarakat yang permohonannya jumlahnya paling banyak yaitu akta kelahiran, serta mempercepat target capaian nasional		V	1. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; 2. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan		V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

					Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran; 3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil				
11.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penyelenggaraan Pajak dan Retribusi Daerah serta Penyesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	V		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	V		Bagian Hukum dan Kerjasama Sekretariat Daerah	

4.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 8 Nopember 2022

**WAKIL KETUA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SURABAYA,**

Ttd.

A. HERMAS THONY

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SURABAYA,**



**Mutandar Rachman, S.H., M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19660111 199602 1 002**